



UPDATE PENETAPAN NI PPPK TA 2023





KANREG V BKN



PENETAPAN NI PPPK FORMASI 2023 SE-WILAYAH KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA

JUMAT, 01/03/24 PUKUL 16.00 WIB



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berprestasi

jakarta.bkn.go.id

**bangga
melayani
bangsa**

No	Nama Instansi Pemerintah	Jumlah Usulan	Usul Belum Masuk	Usul & Perbaikan Masuk	ACC	BTS	TMS	Persentase
1	Pemerintah Kab. Bengkayang	1.029	0	29	492	508	0	48%
2	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	1.592	0	12	1542	38	0	97%
3	Pemerintah Kab. Pringsewu	950	0	523	311	115	0	33%
4	Pemerintah Kab. Kayong Utara	373	0	23	343	7	0	92%
5	Pemerintah Kota Singkawang	192	0	0	94	98	0	49%
6	Pemerintah Kab. Lampung Barat	335	0	4	28	302	0	8%
7	Pemerintah Kab. Kubu Raya	283	0	0	283	0	0	100%
8	Pemerintah Kab. Pesawaran	281	0	3	278	0	0	99%
9	Pemerintah Kab. Mempawah	69	0	50	18	1	0	26%
10	Pemerintah Kota Bandar Lampung	389	0	6	381	2	0	98%
11	Pemerintah Kota Metro	204	0	31	172	1	0	84%
12	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	519	0	174	260	85	0	50%
13	Pemerintah Kab. Sanggau	1.512	553	830	0	0	0	0%
14	Pemerintah Kab. Way Kanan	98	0	43	53	2	0	54%
15	Pemerintah Kab. Landak	899	0	33	796	69	0	89%
16	Pemerintah Kab. Tanggamus	749	0	0	729	20	0	97%
17	Pemerintah Kab. Ketapang	894	0	644	250	0	0	28%
18	Pemerintah Kab. Sekadau	798	0	360	434	3	0	54%
19	Pemerintah Kab. Mesuji	514	0	65	323	125	1	63%
20	Pemerintah Kab. Lampung Utara	98	0	44	54	0	0	55%
21	Pemerintah Kota Pontianak	851	0	6	845	0	0	99%
22	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	2	0	0	0	3	0	0%
23	Pemerintah Kab. Lampung Timur	197	0	7	187	3	0	95%
24	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	151	0	47	74	30	0	49%
25	Pemerintah Prov. Daerah Khusus Ibu kota Jakarta	1.618	0	1000	572	46	0	35%
26	Pemerintah Provinsi Sintang	951	0	1	949	0	0	99%
27	Pemerintah Provinsi Lampung	5.365	0	4935	427	3	0	8%
28	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	232	0	231	1	0	0	0%
29	Pemerintah Kab. Sambas	2	0	2	0	0	0	0%
30	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	211	0	2	207	1	0	98%
		21.358	553	9.105	10.103	1.103	3	54%

ACC: usul penetapan yang sudah ttd pertek

BTS : usul penetapan yang data atau berkasnya belum sesuai

TMS : usul yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan



PROGRESS

PENETAPAN NIPPPK TEKNIS

DI WILAYAH KERJA
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

PER TANGGAL
1 MARET 2024

TOTAL USUL
MASUK

3432

TOTAL USULAN
DIVALIDASI

1892

PERSENTASE
HARIAN

55%

**) Persentase berdasarkan jumlah data masuk
perhari ini dibanding penyelesaian*



PROGRESS PENETAPAN NIPPPK TEKNIS

DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

INSTANSI	USUL MASUK	PROSES VERIFIKASI	BTS	TMS	ACC
Pemerintah Kab Probolinggo	73	30	2	0	41
Pemerintah Kab Madiun	46	19	10	0	17
Pemerintah Kota Probolinggo	75	2	0	0	73
Pemerintah Kab Tuban	70	70	0	0	0
Pemerintah Kab Blitar	78	78	0	0	0
Pemerintah Kab Sidoarjo	0	0	0	0	0
Pemerintah Kota Madiun	0	0	0	0	0
Pemerintah Kab Sampang	0	0	0	0	0
Pemerintah Kab Mojokerto	0	0	0	0	0
Pemerintah Kab Ngawi	0	0	0	0	0
Pemerintah Kab Bojonegoro	0	0	0	0	0
Pemerintah Kab Bondowoso	TIDAK MENGUSULKAN FORMASI PPPK TAHUN 2023				
Pemerintah Kab Situbondo	TIDAK MENGUSULKAN FORMASI PPPK TAHUN 2023				

KETERANGAN :

- Usul masuk merupakan usulan dari instansi yang diajukan melalui Aplikasi SIASN.
- BTS : Dokumen usulan dalam perbaikan dikembalikan ke instansi.
- TMS : Dokumen usulan tidak memenuhi syarat.
- ACC : Dokumen usulan memenuhi syarat.

PER TANGGAL 1 MARET 2024

PROGRESS PENETAPAN **NIPPPK TEKNIS**

DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

INSTANSI	USUL MASUK	PROSES VERIFIKASI	BTS	TMS	ACC
Pemerintah Kab Lumajang	76	0	0	0	76
Pemerintah Prov Jawa Timur	650	243	20	0	387
Pemerintah Kota Blitar	54	0	0	0	54
Pemerintah Kab Ponorogo	130	73	4	0	53
Pemerintah Kab Nganjuk	95	1	0	0	94
Pemerintah Kab Pasuruan	25	25	0	0	0
Pemerintah Kab Pamekasan	50	1	0	0	49
Pemerintah Kab Kediri	30	1	0	0	29
Pemerintah Kab Lamongan	173	36	7	0	130
Pemerintah Kab Banyuwangi	59	0	1	0	58
Pemerintah Kab Tulungagung	153	20	3	0	130
Pemerintah Kab Malang	248	179	17	0	52
Pemerintah Kota Batu	245	160	39	0	46

PER TANGGAL 1 MARET 2024

PROGRESS PENETAPAN **NIPPPK TEKNIS**

DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

INSTANSI	USUL MASUK	PROSES VERIFIKASI	BTS	TMS	ACC
Pemerintah Kota Malang	21	0	0	0	21
Pemerintah Kota Mojokerto	25	0	8	0	17
Pemerintah Kab Magetan	97	0	10	0	87
Pemerintah Kab Jember	89	60	8	0	21
Pemerintah Kab Jombang	54	1	5	0	48
Pemerintah Kab Trenggalek	77	15	1	0	61
Pemerintah Kota Surabaya	474	280	2	0	192
Pemerintah Kota Kediri	41	17	0	0	24
Pemerintah Kab Pacitan	67	15	6	0	46
Pemerintah Kab Gresik	36	5	1	0	30
Pemerintah Kab Sumenep	50	0	1	0	49
Pemerintah Kota Pasuruan	20	1	14	0	5
Pemerintah Kab Bangkalan	51	49	0	0	2

PER TANGGAL 1 MARET 2024



PROGRESS

PENETAPAN NIPPPK GURU

DI WILAYAH KERJA
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

PER TANGGAL
1 MARET 2024

TOTAL USUL
MASUK

21121

TOTAL USULAN
TERVERIFIKASI

4343

PERSENTASE
HARIAN

21%

**) Persentase berdasarkan jumlah data masuk
perhari ini dibanding penyelesaian*

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@bkn2surabaya



surabaya.bkn.go.id



Official Kanreg II BKN



PROGRESS PENETAPAN NIPPPK GURU

DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

INSTANSI	USUL MASUK	PROSES VERIFIKASI	BTS	TMS	ACC
Pemerintah Kab Bangkalan	551	541	1	0	9
Pemerintah Kab Probolinggo	575	522	30	0	23
Pemerintah Kab Ngawi	434	385	9	0	40
Pemerintah Kab Malang	977	940	3	0	34
Pemerintah Kab Pasuruan	1578	1504	31	0	43
Pemerintah Kab Madiun	377	307	43	0	27
Pemerintah Kota Probolinggo	113	74	2	0	37
Pemerintah Kab Tuban	329	307	8	0	14
Pemerintah Kab Blitar	1246	1246	0	0	0
Pemerintah Kota Batu	0	0	0	0	0
Pemerintah Kab Bojonegoro	0	0	0	0	0
Pemerintah Kab Bondowoso	TIDAK MENGUSULKAN FORMASI PPPK TAHUN 2023				
Pemerintah Kab Situbondo	TIDAK MENGUSULKAN FORMASI PPPK TAHUN 2023				

KETERANGAN :

- Usul masuk merupakan usulan dari instansi yang diajukan melalui Aplikasi SIASN.
- BTS : Dokumen usulan dalam perbaikan dikembalikan ke instansi.
- TMS : Dokumen usulan tidak memenuhi syarat.
- ACC : Dokumen usulan memenuhi syarat.

PER TANGGAL 1 MARET 2024

PROGRESS PENETAPAN NIPPPK GURU

DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

INSTANSI	USUL MASUK	PROSES VERIFIKASI	BTS	TMS	ACC
Pemerintah Kota Malang	186	63	9	0	114
Pemerintah Kota Mojokerto	39	0	8	0	31
Pemerintah Kab Magetan	1128	1031	0	0	97
Pemerintah Kab Jember	20	20	0	0	0
Pemerintah Kab Jombang	9	0	0	0	9
Pemerintah Kab Mojokerto	453	411	1	0	41
Pemerintah Kab Pamekasan	284	252	3	0	29
Pemerintah Kota Surabaya	1483	1482	1	0	0
Pemerintah Kota Kediri	174	152	7	0	15
Pemerintah Kab Pacitan	225	178	11	0	36
Pemerintah Kab Gresik	50	3	1	0	46
Pemerintah Kab Sumenep	182	5	1	0	176
Pemerintah Kota Pasuruan	120	0	120	0	0

PER TANGGAL 1 MARET 2024

PROGRESS PENETAPAN NIPPPK GURU

DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

INSTANSI	USUL MASUK	PROSES VERIFIKASI	BTS	TMS	ACC
Pemerintah Kab Lumajang	349	3	2	0	344
Pemerintah Prov Jawa Timur	5464	3373	165	0	1926
Pemerintah Kota Blitar	143	2	7	0	134
Pemerintah Kab Ponorogo	250	67	6	0	177
Pemerintah Kab Nganjuk	1377	1176	75	0	126
Pemerintah Kab Sidoarjo	57	0	0	0	57
Pemerintah Kab Kediri	250	170	11	0	69
Pemerintah Kota Madiun	92	43	16	0	33
Pemerintah Kab Lamongan	1563	1112	23	0	428
Pemerintah Kab Banyuwangi	125	2	3	0	120
Pemerintah Kab Sampang	517	441	0	0	76
Pemerintah Kab Trenggalek	342	289	29	0	24
Pemerintah Kab Tulungagung	59	51	0	0	8

PER TANGGAL 1 MARET 2024

PROGRESS

PENETAPAN NIPPPK NAKES

DI WILAYAH KERJA
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

PER TANGGAL
1 MARET 2024

TOTAL USUL
MASUK

9219

TOTAL USULAN
DI VALIDASI

4205

PERSENTASE
HARIAN

46%

**) Persentase berdasarkan jumlah data masuk
perhari ini dibanding penyelesaian*



PROGRESS PENETAPAN NIPPPK NAKES

DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

INSTANSI	USUL MASUK	PROSES VERIFIKASI	BTS	TMS	ACC
Pemerintah Kota Pasuruan	59	6	4	0	49
Pemerintah Kab Bangkalan	258	249	8	0	1
Pemerintah Kab Probolinggo	427	344	5	0	78
Pemerintah Kab Ngawi	107	86	0	0	21
Pemerintah Kab Madiun	189	109	6	0	74
Pemerintah Kab Tuban	554	554	0	0	0
Pemerintah Kab Blitar	265	265	0	0	0
Pemerintah Kab Sampang	0	0	0	0	0
Pemerintah Kota Batu	0	0	0	0	0
Pemerintah Kota Probolinggo	0	0	0	0	0
Pemerintah Kab Bojonegoro	0	0	0	0	0
Pemerintah Kab Bondowoso	TIDAK MENGUSULKAN FORMASI PPPK TAHUN 2023				
Pemerintah Kab Situbondo	TIDAK MENGUSULKAN FORMASI PPPK TAHUN 2023				

KETERANGAN :

- Usul masuk merupakan usulan dari instansi yang diajukan melalui Aplikasi SIASN.
- BTS : Dokumen usulan dalam perbaikan dikembalikan ke instansi.
- TMS : Dokumen usulan tidak memenuhi syarat.
- ACC : Dokumen usulan memenuhi syarat.

PER TANGGAL 1 MARET 2024

PROGRESS PENETAPAN NIPPPK NAKES

DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

INSTANSI	USUL MASUK	PROSES VERIFIKASI	BTS	TMS	ACC
Pemerintah Kab Lumajang	294	4	0	0	290
Pemerintah Prov Jawa Timur	1056	734	17	0	305
Pemerintah Kota Blitar	105	0	2	0	103
Pemerintah Kab Ponorogo	371	41	3	0	327
Pemerintah Kab Nganjuk	291	3	2	0	286
Pemerintah Kab Pasuruan	712	478	82	0	152
Pemerintah Kab Sidoarjo	48	0	0	0	48
Pemerintah Kab Pamekasan	102	1	0	0	101
Pemerintah Kab Kediri	202	86	1	0	115
Pemerintah Kota Madiun	78	1	1	0	76
Pemerintah Kab Lamongan	594	120	1	0	473
Pemerintah Kab Banyuwangi	371	5	1	0	365
Pemerintah Kab Trenggalek	120	4	0	0	116

PER TANGGAL 1 MARET 2024

PROGRESS PENETAPAN NIPPPK NAKES

DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA

INSTANSI	USUL MASUK	PROSES VERIFIKASI	BTS	TMS	ACC
Pemerintah Kab Tulungagung	92	1	2	0	89
Pemerintah Kab Malang	289	265	1	0	23
Pemerintah Kota Malang	28	0	0	0	28
Pemerintah Kota Mojokerto	54	0	11	0	43
Pemerintah Kab Magetan	207	1	0	0	206
Pemerintah Kab Jember	56	10	0	0	46
Pemerintah Kab Jombang	96	10	1	0	85
Pemerintah Kab Mojokerto	112	29	3	0	80
Pemerintah Kota Surabaya	1538	1390	1	0	147
Pemerintah Kota Kediri	48	4	0	0	44
Pemerintah Kab Pacitan	130	3	2	0	125
Pemerintah Kab Gresik	318	57	0	0	261
Pemerintah Kab Sumenep	48	0	0	0	48

PER TANGGAL 1 MARET 2024